

**ADVOKASI DAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP  
PEMANFAATAN TANAH HGU PTPN VIII GUNUNG MAS OLEH  
MASYARAKAT CITEKO DAN CISARUA SELATAN**

**ADVOCACY AND LEGAL COUNSELING ON THE UTILIZATION OF  
PTPN VIII GUNUNG MAS HGU LAND BY CITEKO AND SOUTH  
CISARUA COMMUNITIES**

**R S Ma'arif<sup>1a</sup>, M Roestamy<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor  
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

<sup>a</sup>Korespondensi: Rizal Syamsul Ma'arif; E-mail: rizal.syamsul.m@unida.ac.id  
(Diterima: 19-02-2021; Ditelaah: 20-02-2021; Disetujui: 27-04-2021)

**ABSTRACT**

In general, the amount of land owned by the people of Citeko and South Cisarua, Cisarua District, both for agricultural land and for settlements, is mostly land use rights for PTPN VIII Gunung Mas. The status of the land should be a protected area and water infiltration around Puncak, Bogor Regency. At least, of the 1,623 hectares of land belonging to his plantation, around 352.67 hectares have been taken over by residents and businessmen until now in a dispute. Based on findings in the field and information from several illegal land owners and villas standing on land belonging to PTPN Gunung Mas, they said that most did not know if the status of the land was still included in the HGU plantation certificate. All of these have the role of land brokers playing, because the land owners buy land from intermediaries on the grounds that the status of the land is ex or former plantation land and whose certificates can be processed from HGU are upgraded to title certificates. This is of course very detrimental to the parties, whether PTPN as the holder of state assets, or land buyers who do not know the role of biong who easily trade the land, in the end the buyer finds a way to dispute with other people because of mutual claims to the ownership of the cultivated land. . This advocacy and counseling aims to provide education to the surrounding community to mutually protect state-owned assets whose management is handed over to PTPN. If you have already mastered the work, then directions are given so that it is not easy to believe and sell it. It is better if collaborative efforts can be made, so that rights holders acknowledge their use, they are no longer called illegal cultivators.

Keywords: advocacy and legal counseling, land use, cultivators

**ABSTRAK**

Pada umumnya jumlah lahan yang dimiliki oleh masyarakat Citeko dan Cisarua Selatan Kecamatan Cisarua baik untuk lahan pertanian maupun permukiman sebagian besar adalah tanah Hak Guna Usaha PTPN VIII Gunung Mas. Status tanah itu seharusnya menjadi kawasan lindung dan resapan air disekitar Puncak, Kabupaten Bogor. Setidaknya dari 1.623 Hektar lahan milik perkebunannya tersebut ada sekitar 352,67 hektar diserobot warga dan pengusaha hingga saat ini dalam kondisi sengketa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan keterangan dari beberapa pemilik lahan dan vila ilegal yang berdiri di atas tanah milik PTPN Gunung Mas mengatakan bahwa sebagai besar tidak mengetahui jika status tanah tersebut masih masuk dalam sertifikat HGU perkebunan. Itu semua terdapat peran biong (makelar) tanah yang bermain, karena para pemilik lahan tersebut membeli tanah dari perantara dengan alasan status tanah merupakan eks atau bekas lahan perkebunan dan yang sertifikatnya dapat diurus dari HGU ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Hal tersebut tentunya sangat merugikan para pihak, mau itu pihak PTPN sebagai pemegang aset negara, maupun pembeli lahan yang tidak tahu menahu peran biong yang dengan mudah memperjualbelikan lahan tersebut, pada akhirnya si pembeli menemui jalan sengketa dengan orang lain karena saling klaim terhadap kepemilikan tanah garapan. Advokasi dan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan

edukasi kepada masyarakat sekitar untuk sama-sama saling menjaga asset yang dimiliki negara yang pengelolaannya diserahkan kepada PTPN. Jika sudah terlanjur menguasai garapan maka selanjutnya diberikan arahan supaya tidak mudah untuk mempercayai sekaligus menjualnya. Sebaiknya bisa dilakukan upaya kerjasama, agar dalam pemanfaatannya ada pengakuan dari pemegang hak, tidak lagi disebut penggarap liar.

Kata Kunci : advokasi dan penyuluhan hukum, pemanfaatan tahan, penggarap

---

Ma'arif, R, S., Roestamy, M. (2021). Model Asas Kemanfaatan Atas Tanah Terlantar Dari Hak Guna Usaha (HGU) PT perkebunan Nusantara VIII Dikaitkan Dengan Pengembangan Usaha Pondok Pasantren di Kawasan Bopunjur. *Jurnal Qardhul Hasan : Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1) 30-37.

---

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya alam manusia, disamping untuk menjadi tempat tinggal, tanah juga dapat dipergunakan untuk mata pencaharian yang diperoleh dari tanah tersebut dalam arti lain tanah tersebut dijadikan nilai ekonomis. Dengan adanya nilai ekonomis dari tanah tersebut maka tidak sedikit masyarakat memanfaatkan sebidang tanah untuk berbagai sumber kegiatan hidup, baik untuk siapa yang berhak menguasai tanah tersebut dalam artian untuk menjadi tempat tinggal atau kegiatan yang lain

Pada pelaksanaan sesuai dengan amanat UUD 1945 di Indonesia, memandang tanah sebagai modal utama bangsa, sehingga peranan negara dalam pengelolaan sumber daya tanah menjadi sangat vital bagi terwujudnya pembangunan yang adil, makmur, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tertuang jelas pada konstitusi Negara yakni Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa "bumi. Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Aspek kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia tersebut dijabarkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA sebagai dasar kebijakan pertanahan. Secara normatif, jika implementasi kebijakan

pertanahan dilaksanakan secara konsisten, maka sejatinya tujuan untuk pemanfaatan "tanah untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat" dapat tercapai. Pengaturan Hak Bangsa dikemukakan pada Pasal 1 ayat (1) UUPA yang berbunyi : "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : "Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) adalah bersifat abadi".

Jika melihat kepada pendapat dari Iman Soetikno yang membagikan hak menguasai Negara menjadi dua yaitu : hak menguasai aktif dan hak menguasai pasif. Artinya jika menggunakan pasif bermakna bahwa diatas tanah telah ada hak-hak perorangan ataupun keluarga maupun hak-hak lainnya. Sedangkan hak aktif ialah hak menguasai Negara yang meliputi hak-hak perseorangan, keluarga ataupun hak-hak lain apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan.

Perihal hak menguasai negara, ada beberapa macam hak atas permukaan bumi (baca : tanah) yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah : Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak sewa; Hak membuka tanah; Hak memungut hasil hutan; Hak-hak lain yang tidak terasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta

hak-hak yang bersifat sementara. Pada umumnya jumlah lahan yang dimiliki oleh masyarakat Citeko dan Cisarua Selatan Kecamatan Cisarua baik untuk lahan pertanian maupun permukiman sebagian besar adalah tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII Gunung Mas. Status tanah itu seharusnya menjadi kawasan lindung dan resapan air di sekitar Puncak, Kabupaten Bogor. Setidaknya dari 1.623 Hektar lahan milik perkebunannya tersebut ada sekitar 352,67 hektar digarap warga dan pengusaha hingga saat ini dalam kondisi sengketa.

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 114 Tahun 1999 bahwa sudah ditetapkan tentang penataan ruang kawasan Bogor, Puncak Cianjur (Bopunjur). Jauh dari hari ini dikatakan fungsi utama dari kawasan ini ialah sebagai konservasi air dan tanah sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat perkembangan pembangunan yang pesat dan kurang terkedali, sehingga pemanfaatan ruangnya perlu ditertibkan kembali.

Lalu berdasarkan hasil penelitian awal di lapangan dan yang akan menjadi topik utama penelitian ini ialah dari beberapa pemilik lahan, vila dan bahkan pondok pesantren serta lahan pertanian yang berada di atas tanah milik PT. Perkebunan Nusantara VIII Gunung Mas pada umumnya tidak mengetahui jika status tanah tersebut masih masuk dalam sertifikat HGU. Mereka membeli lahan tersebut melalui para penggarap dengan perantara biong (makelar) tanah yang berani bermain tanah, karena para pemilik lahan tersebut membeli tanah dari perantara dengan alasan status tanah merupakan eks atau bekas lahan perkebunan dan yang sertifikatnya dapat diurus menjadi HGU bahkan sertifikat hak milik.

Hal tersebut tentunya sangat merugikan pembeli lahan yang tidak tahu menahu peran biong yang menjadi actor penjualan lahan tersebut, alhasil kedepannya si pembeli menemui jalan sengketa dengan orang lain karena saling

klaim terhadap kepemilikan tanah garapan, malahan pembeli dapat saja berhadapan dengan pihak PTPN VIII Gunung Mas.

Berdasarkan data petugas pendataan lahan PTPN VIII Gunung Mas, dari tahun 1990 silam luas lahan PTPN VIII Gunung Mas sekitar 1.200 hektare. Namun setelah didata ulang, terdapat 700 hektare yang telah beralih fungsi pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut pun tidak semua lahan tertanami, banyak lahan-lahan yang penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanahnya sudah tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak guna usaha, contohnya dengan banyaknya lahan yang digarap masyarakat sebagai bangunan tempat tinggal, villa, kebun warga, fasilitas sosial dan fasilitas umum, tanahnya tidak ditanami ataupun tanahnya ditelantarkan oleh pemegang hak. Lahan-lahan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber penyediaan tanah bagi pembangunan pengembangan pondok pesantren dengan terlebih dahulu mengeluarkan (enclaving) tanah tersebut dari Hak Guna Usaha yang dimiliki pemegang hak.

Dari data di atas masih banyak lahan yang tidak di maksimalkan dengan baik oleh pemegang hak. Sedangkan penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah. Selain itu, penelantaran tanah juga berdampak terhadap terhambatnya pencapaian tujuan program pembangunan nasional, rentannya ketersediaan pangan, ketahanan ekonomi, terbatasnya akses sosial ekonomi pertanian serta tidak seimbangnyasosio harmoni sosial di masyarakat. Penelantaran tanah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak. Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Terlebih khusus di daerah potensial seperti Bogor Puncak dan Cianjur (red. Bopunjur) menjadi destinasi yang menguntungkan bagi wisatawan asing terutama orang – orang Timur Tengah dengan masyarakat sekitar. Turis – turis Arab tersebut tidak semata – mata hanya bepergian tanpa tujuan, mereka memunculkan pengembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih hidup. Dan mayoritas tempat – tempat wisata yang ada di wilayah Bopunjur dijadikan destinasi investasi bagi para turis Arab untuk mengembangkan usahanya.

## **MATERI DAN METODE**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah sistematis. Dalam uraian metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian. Agar suatu penelitian mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi, maka diperlukan metodologi yang benar, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan yuridis normatif yaitu mengkombinasikan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer sehingga menghasilkan analisis fakta yang terjadi dilapangan: Lokasi Penelitian; Adapun lokasi penelitian yaitu; Perpustakaan; Universitas Djuanda; PTPN VIII Gunung Mas; Apdeling Cikopo Selatan; Metode Pendekatan; Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara rinci praktik pemanfaatan lahan di Bopunjur dengan dikaitkan peraturan

perundang-undangan yang ada. Disamping itu pula penulis menggunakan pendekatan focus group discussion dengan para pihak terkait guna mendapatkan data-data pendukung.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan. Dari data tersebut dikombinasikan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan serta keterangan pihak terkait. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

### **Analisis Data**

Data penelitian ini diolah menggunakan analisis data yang berupa analisis kualitatif dengan menguraikan secara langsung sumber data yang di deskripsikan melalui tiga tahap, pertama mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier. Kedua penyajian penelelaahan dan pengolahan data, dan setelah itu menarik kesimpulan secara deduktif dan induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jika dilihat dari judul pengabdian yang diusung yaitu Advokasi dan Penyuluhan Hukum Terhadap Penggarapan Tanah Eks PTPN VIII yang mungkin ada pula masih status HGU-nya ada juga yang memang sudah eks (tidak diusahakan) lagi karena terus menerus masyarakat sudah menguasai.

Tanah HGU PTP VIII sangatlah luas meliputi Jabar Banten, jika di wilayah Puncak sendiri tercatat sampai daerah Pasir Muncang yang mana disana ada juga pondok pesantren yang berdiri diatas tanah HGU PTP yaitu Al Musthafawiyah. Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihaknya dan memang Al-Must adalah mitra utama pengabdian ini, yang nantinya program ini bersama-sama para kyai, mengajak para kyai yang mungkin pondok

pesantrennya berdiri di atas HGU atau mungkin diatas tanah adat akan diusahakan bersama-sama agar mendapatkan sertifikat dalam program Prona. Karena selama ini sudah bisa diterapkan dan Unida dapat seluas 700 m untuk kompleks karyawan Unida.

Untuk program advokasi ini peneliti berharap pada masa yang akan datang bisa terkumpul peserta sasaran yaitu penggarap di atas tanah PTP bisa dikumpulkan untuk membahas bagaimana seyogyanya perlakuan terhadap tanah HGU yang memang PTP ini diberikan hak oleh negara yaitu berupa hak guna usaha (HGU) yaitu hak mengusahakan tanah bukan hak memiliki tanah. Yang memiliki tanah tetap negara atau tanah adat atau *eigendom verponding*.

*Eigendom verponding* pada zaman Hindia Belanda namanya tapi dilakukanlah nasionalisasi kata dalam istilah itu terkenal juga sebutan *nommen verclarinv* pernyataan dari pada yang meninjau semua tanah yang akan digunakan pertanian disebut *verponding* dijadikan tanah hak guna usaha, yang disebut pula namanya *erfact* lalu dinasionalisasi istilah menjadi hak guna usaha.

Sementara wilayah PTP ini sangatlah luas, banyak masyarakat orang perorangan atau pondok pesantren berada di wilayah tanah PTP. Tadi sudah dikatakan bahwa luasan wilayahnya sampai dengan Banten, disanalah ada potensi tidak diusahakannya oleh PTP sendiri atau sengaja ditinggal tanahnya karena sudah tidak produktif untuk penanaman komoditasnya. Disana memunculkan penggarap liar lain apalagi muncul istilah *biong* yang bermain. Kalau sudah dimainkan sama *biong* menjadikan tanah negara ini tidak sehat kondisinya karena berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Daripada tanah ditinggal dan diambil alih oleh *biong* yang nyata merugikan PTP, lebih baik kemudian tanah tersebut secara resmi lewat program pengamanan asset PTP di kelola oleh

lembaga yang resmi seperti pondok pesantren.

Nantinya pondok pesantren dikumpulkan dan membuat sebuah permohonan kerjasama lahan dengan PTP yang kemudian ada hak disana berupa KSO-kah dan penyebutan lainnya. Ini ada tahapan juga bisa ditingkatkan menjadi hak milik, setelah kerjasama dengan PTP dalam jangka waktu tertentu Hak Guna Usahanya habis maka akan dilakukan pengukuran ulang oleh BPN setelah permohonan perpanjangan HGU, jika ditemukan dalam satelit BPN terdapat tanah-tanah yang sudah tidak diusahakan lagi maka dengan otomatis negara tidak boleh memberikan hak perpanjangan terhadap objek tanah tersebut. Jika sudah demikian tahap pertama yang dilakukan yaitu mengkonversi status hak garapan tadi menjadi hak pakai dahulu selama kurang lebih 5 tahun, setelahnya bisa ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan selama 3 tahun. Dan pada akhirnya bisa dimohonkan hak milik.

Ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas yang cukup kuat, dengan begitu pesantren bukan status badan hukumnya saja yang kuat namun status tanahnya juga kuat. Jika ini dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan dan kuat permohonannya.

Dan jika PTP berkenan untuk memberikan kerjasama lahannya dengan pondok pesantren berupa KSO atau MOU lain, sebetulnya status HGU bisa saja tidak lepas, daripada harus dimainkan oleh *biong*. Dengan demikian ini akan menjadi masalah bagi tiga pihak, pondok pesantren dapat legalitas penggunaan lahan, PTP nya untuk mendapatkan kompensasi sewa dan pengamanan lahan HGU, masyarakat sekitar tidak mendapatkan provokasi atas kehadiran para *biong-biong*

Berawal dari pengenalan program pengabdian kali ini lebih kepada bagaimana mengadvokasi pondok-pondok yang berdiri diatas tanah HGU-nya PTPN VIII, ternyata setelah ditanya kepada para pimpinan pondok yang diundang, hampir 80 % bangunan-bangunan diatasnya belum

bersertifikat. Namun ada 5 pondok pesantren menurut koordinator pimpinan tersebut yang memang berdiri diatas HGU PTPN, selebihnya mereka hanya mempunyai girik sebagai alas bukti haknya.

Tidak menutup kemungkinan, program peningkatan status hak apapun itu Unida akan selalu siap membantu pondok pesantren. Apalagi dengan isu ombibus law yang jika disahkan maka keberadaan legalitas pondok salah satunya mengenai kepemilikan tanah harus dipenuhi para pimpinan pondok.

Tahap selanjutnya, setelah pengenalan dan pemaparan maksud dan tujuan diadakannya penyuluhan dan advokasi ini ialah untuk menggalang kekuatan diantara para pondok pesantren di kawasan Bopunjur. Bersama-sama mudah-mudahan tahap demi tahap akan membuat Prona pondok pesantren. Dengan Unida yang bekerja secara langsung para kyai mendukung dari bawah sama-sama gotong royong merangkul pondok pesantren disekitarnya, dan mendukung dari atas berupa doa yang dipanjatkan agar stakeholder pertanahan termasuk pemerintah bisa terketuk hatinya.

Membahas tentang praktek garapan tanah di Kabupaten Bogor memang identik dengan daerah wisatanya yaitu daerah Puncak Cisarua. Menjadi primadona kawasan wisata menjadikan lahan puncak disalahgunakan oleh beberapa oknum makelar yang disebut calo tanah garapan. Dari warga biasa sampai dengan aparat pemerintah memegang andil praktek jual beli lahan garapan di Puncak.

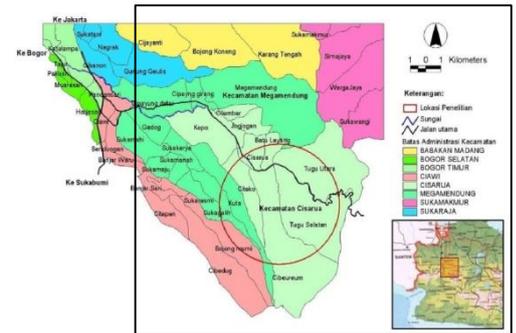
Tabel 1.

Cakupan Luasan HGU PTPN VIII Gunung Mas

NO	APDELING	LUAS (HA)	CAKUPAN WILAYAH
1	Gunung Mas 1	462,75	Tugu Selatan (Kecamatan Cisarua)
2	Gunung Mas 2	419,20	Tugu Selatan (Kecamatan Cisarua)
3	Cikopo Selatan	741,23	Citeko, Kopo (Kecamatan Cisarua) Kuta, Sukagalih,

			Sukakarya, Sukaesmi (Kecamatan Megamendung)
<b>TOTAL</b>		1.623,18	Puncak Bogor

Gambar 1. Denah posisi Kebun Gunung Mas (lingkaran)



Sementara itu, data yang didapat dari kantor administratur gunung mas mengatakan bahwa dari 1.623 hektar lahan milik perkebunan PTPN tersebut sekitar 352,67 hektar lahan diserobot warga dan pengusaha sampai saat ini masih berstatus sengketa dan sampai hari ini lahan HGU tersebut dipastikan semakin menipis dikarenakan tanahnya diterlantarkan dengan kondisi perusahaan tidak mampu lagi untuk mengelolanya.

PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang proses produksi, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Sebagai perusahaan perkebunan Negara, PTPN VIII tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. PTPN VIII bukan hanya bekerja untuk mencari keuntungan bisnis semata namun lebih dari itu, mesti memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, dan tentu saja termasuk masyarakat di sekitar perkebunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kegiatan pengabdian di lapangan yang tim lakukan serta dengan melakukan kegiatan penyuluhan, di hasilkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yaitu belum adanya kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai oleh penggarap karena masih terdaftar sebagai aset PTPN, sehingga keadaan ini memposisikan tanah tersebut menjadi status quo.

Belum adanya kepatian hukum yang dimiliki oleh penggarap dalam hal pengelolaan lahan tanah untuk kepentingan bersama.

Melalui pendayagunaan aset yang digaungkan oleh PTPN berharap mampu untuk hadir sebagai pengayom agar para kyai atau tokoh masyarakat terhindar dari aksi provokatif dari para biong yang ingin memanfaatkan tanah PTPN. Padahal itu adalah tanah negara, oleh karena itu PTPN melalui politik will dan konsep yang sudah ada harus lebih membantu mempermudah akses terhadap tanah guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini ialah pendirian pondok pesantren tujuannya tidak lain dalam rangka melindungi rakyat untuk mengelola tanah (tanah untuk rakyat).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemristek Dikti melalui LLDIKTI Wilayah IV atas dana penelitian, kepada segenap pimpinan Universitas Djuanda Bogor atas dukungan moril dan spiritual serta fasilitas yang telah diberikan serta memberikan kontribusi mulai dari persiapan sampai terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren, warga masyarakat di seputaran Cisarua Selatan, Citeko yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.P Parlindungan. *Landreform di Indonesia Suatu Perbandingan*. 1987. Bandung : Mandar Maju.
- ..... *Aneka Hukum Agraria*. 1986. Bandung : Alumni
- ..... Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria.
- Bernard L. Tanya. 2013. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*. 1994. Jakarta : Djambatan.
- Boedi Harsono dalam Abdurrahman. *Beberapa Masalah tentang Landreform*. 1990. Pusat Studi Hukum Tanah Fakultas Hukum. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat.
- Martin Roestamy. *Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi WNA*. 2011. Bandung : PT. Alumni
- Martin Roestamy et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2015. Bogor : Unida Press.
- M. Ali Mansyur. *Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. 2006. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. 2001. Jakarta : Rajawali Press.
- Soeprapto, *UUPA dalam Praktek*. 1986. Jakarta.
- Sri Hajati dan Agus Sekarmadji. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. 2011. Surabaya : Airlangga University.

### JURNAL

- Martin Roestamy. *Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, Advokasi dan Penyuluhan Hukum Terhadap Penggarapan Tanah Ex-PTPN Gunung Mass Oleh Masyarakat Citeko dan Cisarua Selatan*. 2019. Bogor : Kemenristekdikti.
- , *Human Basic Need of Housing Supported By Land Bank System*, dalam *Jurnal Internasional IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*. Vol. V Issue 14, Agustus 2019
- Martin Roestamy, St. Pupu Fauziah, Radif Khotamir Rusli, *Society's Legal Conflicts Due to Accelerated Socio - cultural Interactions Between Foreign Tourists and the Bopuncur Community*, dalam *International Journal of*

Innovation, Creativity, and Change, Vol. 11 Issue 4 Tahun 2020.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, Majalah Fakultas Hukum Undip "Masalah-masalah Hukum" No. 9, 1991.
- Subroto, Martin Roestamy, Ahmad Madjedi Hasan. 2015. *Redistribusi Tanah Menuju Penguasaan Tanah yang Berkeadilan*, Program Studi Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor.
- Suhariningsih. *Kebijakan Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah*. Dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 2 Tahun 2011

Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*  
<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastianhukum/>

## UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

## MEDIA ELEKTRONIK

- Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*  
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>
- 700 hektare lahan hilang,  
<http://www.google.com/amp/s/www.radarbogor.id/201712/29/700-hektare-lahan-hilang/amp/>
- Konsep negara hukum,  
<http://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum>
- <http://Wikipedia/Profil-PTPN-VIII-Jabar-Banten>  
<https://setkab.go.id/perpres-no-862018-inilah-tanah-yang-akan-jadi-objek-reforma-agraria-dan-subjeknya/>
- <http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/arioneuodia/kewaspadaan-nasional-terhadap-pemanfaatan-lahan-terlantar-dapat-mewujudkan-ketahanan-pangan>.
- <http://www.google.com/www.kompasiana.com/arioneuodia/kewaspadaan-nasional-terhadap-pemanfaatan-lahan-terlantar-dapat-mewujudkan-ketahanan-pangan> diakses pada tanggal 21 April 2020